

STRATEGI PROGRAM KERJA PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MANDIRI DI DESA PULAU HARAPAN KECAMATAN PULAU SEMBILAN

Oleh:
Asriadi AR & Baharuddin
(Dosen STISIP Muhammadiyah Sinjai)

Abstrak

Latar belakang penelitian ini berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode *Kualitatif*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi program kerja desa dalam membangun masyarakat mandiri.

Pemerintah merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan mengurus masalah yang ada dalam masyarakat, demi terciptanya suatu kehidupan yang adil dan makmur. Peran serta dari masyarakat dalam proses perancangan program kerja pembangunan tidak lepas dari tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-undang. Sehingga peran serta dari masyarakat tidak bisa dianggap sebelah mata saja, maka dalam rangka memaksimalkan peran pemerintah Desa dalam proses pembangunan harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan suatu desa. Keikutsertaan masyarakat merupakan faktor penentu suatu pembangunan. Dalam proses ini pemerintah desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan harus memiliki langkah-langkah atau cara-cara yang dianggap ampuh untuk mempengaruhi keikutsertaan masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.

Dari hasil penelitian bahwa strategi yang di buat oleh pemerintah desa Pulau Harapan dalam pelibatan masyarakat merancang program kerja pembangunan dianggap belum maksimal karena masih banyaknya program kerja yang diusulkan masyarakat yang bukan merupakan program kerja desa di Pulau Harapan.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah desa, Presepsi Masyarakat, Pembanguna Desa

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah/kabupaten/kota. Selanjutnya didalam tiap daerah kebupaten/kota terdapat satuan pemerintahan yang disebut kelurahan dan desa. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Kemiskinan dan ketidakberdayaan, kesenjaangan sosial, eksploitasi sumberdaya alam, ketergantungan, serta ragam konflik

agraria menjadi gambaran faktual dalam lintasan sejarah desa(atau nama lainnya) di Indonesia.

UU Desa telah menegaskan pengakuan negara atas hak-hak konstitusional desa sebagai satuan sosial dan pemerintahan yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, tidak lagi diperlakukan sebagai bagian dari pemerintah supra desa. Format baru pengakuan eksistensi desa ini sekali-gus diikuti oleh pengembangan berbagai sumber dana penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 6 ayat 3 Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: Pasar Desa; pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengelolaan usaha hutan Desa; kolam ikan dan pemberian ikan; kapal penangkap ikan; gudang pendingin; tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak; sarana dan prasarana ekonomi lainnya.

Pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 6 ayat 5 bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, Pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Kegagalan dalam merespon Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa karena kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang maksimal dari pemerintah bisa menciptakan sumber konflik baru yang pada akhirnya bisa jalannya roda pemerintahan. Untuk mendisain dan menentukan model birokrasi yang tepat maka perlu dilakukan perubahan yang mendasar terhadap birokrasi publik di desa agar dapat terwujud birokrasi yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan.

Kondisi ini mengisyaratkan perlunya ide strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan

untuk mereformasi birokrasi desa dalam pengembangan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam rencana penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Strategi Program Kerja yang dilakukan oleh Pemerintah dalam membangun masyarakat Mandiri?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Strategi Program Kerja yang dilakukan oleh Pemerintah dalam membangun masyarakat Mandiri?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan: a) Mendeskripsikan dan menganalisa perspektif Pemerintah Desa terhadap strategi program kerja dalam membangun kemandirian masyarakat. b) Mengembangkan wacana publik yang kritis dan konstruktif dalam mengembangkan gagasan dan kebijakan otonomi, kemandirian, dan demokrasi desa yang mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat desa.

4. Mamfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermafaat dan memberikan kontribusi ide dan strategi membangun kemandirian desa di Kabupaten Sinjai. Manfaat praktis adalah: a) bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan desa berbasis kemandirian. b) kontribusi pokok pikiran bagi pemerintahan desa dalam pengembangan otonomi dan kemandirian ekonomi desa. c) menjadi sarana penulis untuk lebih memperluas dan mendalami serta dapat menjadi bahan perbandingan pengetahuan tentang program kerja desa.

1. Konsep Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Amanah regulasi ini merupakan tantangan bagi pelaku kebijakan dalam konteks implementasi Undang-undang Desa. Keadaan ini membutuhkan pemahaman penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta kemandirian desa untuk menuju masyarakat yang madiri.

2. Konsep Membangun Masyarakat Mandiri Melalui Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan

tidak tahu, dengan demikian mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui pengembangan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan pengembangan kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan.

Pada pengorganisasian masyarakat, kuncinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelakunya. Untuk itu masyarakat perlu diajak mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dan pelestarian. Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak.

Prinsip dasar pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri. Sebuah masyarakat yang mandiri adalah impian sebagian seluruh masyarakat Indonesia. Kemandirian masyarakat bisa dilihat dari tingkat ketergantungan masyarakat pada dunia luar. Dengan demikian, masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya dengan kemampuan mereka sendiri. Kebutuhan dasar yang dimaksud di sini adalah kebutuhan yang paling dasar, yaitu sandang, pangan dan perumahan.

3. Lingkungan Strategis Penangulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Mandiri

a. Otonomi Daerah dan *Good Governance*

Reformasi berarti menata ulang dalam rangka perbaikan Negara, yang pada hakikatnya

melakukan perbaikan pada tiga unsur dasar kehidupan bernegara :

- 1) Sistem Konstitusi dan Sistem Hukum Nasional.
- 2) Pemerintahan/Penyelenggaraan Negara.
- 3) Rakyat/Masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu perangkat penting dalam kerangka perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya menyangkut hubungan pemerintah (pusat) dan daerah (lokal).

Salah satu wujud pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memperhatikan dan responsive terhadap kehendak dan aspirasi masyarakat, serta melibatkan (partisipasi) mereka dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai aspek kepentingan masyarakat (kebijakan publik). Ciri-ciri pemerintahan yang baik:

- 1) Mengikutisertakan semua pihak.
- 2) Transparan dan bertanggung jawab.
- 3) Efektif dan adil.
- 4) Menjamin adanya supermasi hukum.
- 5) Mejamin prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada consensus masyarakat.
- 6) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah.

Sedangkan unsur-unsur tata pemerintahan yang baik adalah: 1) Partisipasin; 2)Supermasi Hukum; 3) Transparansi; 4) Cepat Tanggap; 5) Membangun Konsensus; 6) Kesetaraan; 7) Efektif dan Efesien; 8) Bertanggung Jawab; 9) Visi Strategis. Tuntutan pelaksanaan otonomi daerah dan *good governance* diharapkan membawa perubahan besar terhadap peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin.

b. Globalisasi

Disamping otonomi daerah, globalisasi merupakan lingkungan strategis yang akan mempengaruhi kehidupan bangsa yang akan datang, adanya globalisasi harus dapat menjadi pendorong dan mempercepat proses adopsi dan implementasi pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia (*baik pusat maupun daerah*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui *sustainable development*, yaitu mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan potensi yang besar dan beragam, Indonesia mempunyai peluang baik untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing dengan bangsa lain didunia, dengan memperhatikan:

- 1) Kemampuan menghasilkan komoditi yang lebih murah dari pesaing yang tidak cukup untuk menjamin keunggulan daya saing internasional.
- 2) Kemampuan untuk menyediakan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen yang berkembang.
- 3) Keunggulan daya saing ditentukan oleh kemampuan mendayagunakan keunggulan komparatif yang dimiliki dari hulu hingga hilir, dalam menghasilkan produk sesuai dengan preferensi konsumen yang berkembang.

4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (*Enterpreneurial Government*)

Di Indonesia, konsep dan gagasan tentang birokrasi pemerintahan dikelola dengan prinsip kewirausahaan mulai bergema diera tahun 95-an beberapa orang pemerhati masalah birokrasi

menyuarkan perlunya birokrasi pemerintah merubah orientasi menjadi lembaga yang berjiwa wirausaha. Hal ini dikemukakan oleh Tjokrowinoto (1992):

“Tantangan yang harus dihadapi birokrasi adalah, bagaimana dapat memainkan perannya yang optimal didalam konteks, disatu pihak, menguatnya peranan sektor swasta sebagai akibat dari proses liberalisasi tadi, dan dipihak lain adanya tuntutan normatif untuk mewujukkan keadilan sosial dan menanggulangi kemiskinan. Peranan ini akan dapat dilaksanakan apabila birokrasi memainkan peranannya dalam kapasitas sebagai *entrepreneurial government* dan *empowering government*.”

David Osborne dan Ted Gaebler (1996) dengan karyanya yang monumental “*Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*” mencoba untuk menemukan kembali pemerintahan dengan mengembangkan konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha (*Entrepreneurial Government*). Esensi dasar yang sangat strategis dari pemikiran Osborne dan Ted tersebut berkaitan erat dengan birokrasi pemerintahan yang tidak lagi berorientasi pada budaya sentralisasi, strukturalisasi, formalisasi dan apatistik melainkan pada desentralisasi pemberdayaan, kemitraan, fungsionalisasi dan demokratisasi. Fungsi pemerintahan yang moden strateginya harus diarahkan pada daya dukung dan daya dorong untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam dalam proses kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Osborne (1995) mengungkapkan sesuatu yang perlu menjadi pegangan dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan bahwa organisasi bisnis tidak bisa disamakan dengan lembaga

pemerintah dan memang terdapat banyak perbedaan satu dengan yang lainnya. Pemerintah tidak dapat dijalankan seperti sebuah bisnis, tentu saja tidak berarti bahwa pemerintah tidak bisa bergaya wirausaha.

5. Prinsip-prinsip Pemerintahan

Selanjutnya Osborne dan Gaebler (1995) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan wirausaha yaitu :

a. Pemerintahan Katalis

Pemerintahan katalis menghendaki peran pemerintah sebagai aktor dan pelaksana urusan publik perlu dikurangi dan pemerintah sebagai pengarah serta memusatkan perennanya dalam membuat kebijakan, peraturan dan undang-undang. Redefenisi peran pemerintah perlu dilakukan karena selama ini pemerintah terlalu memonopoli semua urusan publik. Pembagian peran yang proporsional dan komplementer antara pemerintah, pasar dan masyarakat perlu dilakukan.

b. Pemerintahan Milik Masyarakat

Pemerintahan milik masyarakat diartikan sebagai pengalihan wewenang kontrol pemerintah ketangan masyarakat dan adanya perubahan misi dari pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dan bukan sebagai pelayanan. Sehingga fungsi utama dari pemerintah adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil kendali atas penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Pemerintahan yang kompetitif

Pemerintahan kompetitif mensyaratkan persaingan diantara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Pemerintah dikenal sangat monopolistik

dalam menyelenggarakan urusan publik, akibatnya terjadi inefisiensi, kelambanan dan buruknya kualitas pelayanan. Untuk itu pemerintah harus mampu merangsang, mendorong dan menciptakan sistem kompetisi antar berbagai pelaku yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kompetisi disini tidak terbatas pada kompetisi antara pemerintah dengan swasta tetapi bisa juga antar swasta atau bahkan antara pemerintah dengan pemerintah.

d. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi

Pemerintah yang berorientasi misi dilakukan dengan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal meyederhanakan sistem administrasi. Bryson (2001:23) memberikan pandangannya tentang perancanaan strategis yang harus dimiliki oleh organisasi nirlaba dengan berawal dari adanya misi yang jelas, hal ini dimaksudkan karena sistem perencanaan lama tidak mampu lagi merespon perubahan yang terjadi begitu cepat. Pemerintah hanya bisa adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat, kalau pemerintah berorientasi pada misi.

Konsep dan ide tentang jiwa wirausaha yang ditelah dikemukakan oleh Osborne tersebut tentunya tidak semudah dan sesederhana yang digambarkan. Relevansi diterapkannya ide tersebut di desa tentu saja merupakan tanda tanya besar yang perlu dijawab.

Kesiapan birokrasi dalam merespon perkembangan dan tuntutan tersebut menjadi agenda penting yang perlu direnungi dan menjadi kajian awal mendalam dalam rangka mereformasi birokrasi. Disinilah letak pentingnya untuk mengetahui

tentang pemahaman, pengetahuan dan persepsi para birokrat terhadap ide-ide dan konsep tersebut, yang pada akhirnya dapat diterapkan dengan penyesuaian kondisi dan situasi yang ada.

Pengembangan *entrepreneurial government* atau Pemerintahan bergaya wirausaha dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pada penciptaan pemerintah yang efisien, tanggap dan akuntabel.

6. Pengertian dan Pemahaman Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan. Melalui persepsi individu dapat menyadari dan mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal (perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan) dan faktor eksternal (stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung).

Pengertian persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Robbins (2001: 89) mengemukakan bahwasanya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, yaitu:

- a. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
- b. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecendrungan kita untuk mengejolokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.
- c. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis yang merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologis, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Secara umum sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan sumber yang tidak tertulis atau data lapangan melalui wawancara mendalam kepada informan kunci atau melalui teknik *snowball*.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis.

Sedangkan jenis data yang dikumpulkan melalui kedua sumber data tersebut dapat berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati

atau diwawancara mendalam. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio tape, pengambilan foto atau film. Untuk sumber tertulis, dilihat dari sumber data berupa bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah, koran, arsip, dokumen pribadi dan atau dokumen resmi.

3. Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian f ini adalah:

- a. Pemerintah Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai yang telah menjadi Informan (Kepala Desa, Sekretaris Desa).
 - b. Badan Perpusyawarata Desa dan Badan Usaha Milik Desa yang telah menjadi Informan (Ketua BPD dan Sekretaris BPD).
 - c. Masyarakat Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa.
- 1) Bidang Pendidikan (Ir. Mikyal Asyad, S. Pd. M. Pd., Arman, S. Pi., dan A. Maryam Monggana, S. Pd.)
 - 2) Bidang Perekonomian Desa (Muh. Aming, Muh. Tang dan Harun)
 - 3) Bidang Kesehatan (Rasmawati, Juwita dan Ramli)
 - 4) Bidang Keagamaan (H. Adhan, Mihaya dan St. Londe)
 - 5) Bidang Sarana dan Prasarana Desa (Sukarman, Rasmawati Muin, S. Pd, Rusdi dan Muzawwir, S. Pd.I., M. Pd)
 - 6) Bidang Pemerintahan Umum (Karmila HM, S. Sos, Ahmad)

4. Defenisi Operasional Penelitian

Pemerintahan Desa sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pasal 26 ayat 2 Kepala Desa memiliki wewenang membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Selain itu, tertuang juga pada pasal 72 pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

Potensi desa dan regulasi tentang desa merupakan kekuatan pengembangan wirausaha desa tetapi harus diawali pembentukan jiwa wirausaha bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa. Ide strategi dalam pengembangan jiwa wirausaha Pemerintahan Desa dilakukan dengan pendidikan dan latihan bergaya Wirausaha.

Strategi pengembangan IPTEKS berbasis program, diawali dengan pembentukan jiwa wirausaha bagi pemerintah desa dan masyarakat Desa. Outcome kegiatan ini adalah perubahan pola pikir dan munculnya usaha-usaha desa. Adanya usaha-usaha berbasis kearifan lokal dilanjutkan dengan pengembangan pemasaran dan produksi. Melalui strategi pengembangan jiwa wirausaha ini diharapkan dapat membangkitkan semangat wirausaha di Desa sehingga mampu memberikan stimulus munculnya usaha-usaha berbasis kearifan lokal menuju masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.

5. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui teknik:

- a. Observasi, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (mengajukan sejumlah pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti).
- b. Wawancara, melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (*Interview* dalam kelompok tertentu).
- c. Dokumen-dokumen, mengumpulkan dokumen berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, e-mail).
- d. Materi audio dan visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, videotape, atau segala jenis suara atau bunyi.

6. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Mile dan Huberman yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis interaktif ini dijalankan dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dilapangan.
2. Display data atau penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Conclusion dan Verification atau penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung.

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Hasil Penelitian

Dalam hasil wawancara penulis kepada kepala Desa Pulau Harapan pada hari Senin, Tanggal 16 Mei 2016 mengatakan bahwa:

“Dalam merancang program kerja Desa yang perlu diperhatikan adalah isu-isu strategis antara lain sebagai berikut:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana utamanya perbaikan jalan dan drainase, Air Bersih.
- b. Upaya peningkatan perekonomian masyarakat.
- c. Peningkatan taraf keagamaan dan sosial Budaya masyarakat.
- d. Penigkatan kesadaran masyarakat utamanya kebersihan lingkungan.
- e. Peningkatan taraf kesehatan dan kualitas pendidikan masyarakat.

Hasil wawancara tersebut, peneliti mencoba untuk melihat Dokumen RPJM Desa Tahun 2016 s.d 2021 yang ada di kantor Desa, maka peneliti mendapatkan informasi dari Sekretaris Desa Karmila HM, S. Sos dalam bentuk soft file dengan data sebagai berikut:

Dalam program pembangunan desa Pulau harapan, perlu diketahui peta permasalahan dan potensi di wilayah desa Pulau harapan. Oleh karena itu, program pembangunan desa Pulau harapan disusun dengan menjabarkan langkah-langkah pelaksanaan visi dan misi RPJM desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, aturan dan regulasi yang berlaku, kondisi, masalah dan potensi serta kemampuan desa, dan penentuan prioritas program yang

disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan. Potensi yang ada pada Desa Pulau Harapan diantaranya :

- a. Potensi sumber daya alam (hasil laut baik dari tangkapan nelayan pancing, Nelayan penyelam, nelayan yang memakai jaring serta hasil dari budidaya rumput laut).
- b. Sumber daya manusia yang ada di Desa Pulau harapan masih perlu digali, dengan melihat jumlah penduduk yang mencapai 3.486 jiwa.
- c. Secara ringkas potensi yang ada di Desa Pulau harapan sebagai berikut:
 - 1) Adanya berberapa Sarjana lulusan berbagai perguruan tinggi.
 - 2) Sumber daya usia produktif baik laki-laki maupun perempuan.
 - 3) Adanya berbagai jenis sektor usaha yang berkembang seperti perdagangan, pengolahan hasil laut, dan jasa transportasi serta jasa keuangan.
 - 4) Adanya sarana kesehatan yang bisa.
 - 5) Unsur kelembagaan yang sudah lengkap.
 - 6) Hasil pembangunan sebagai modal dasar.

Hasil-hasil pembangunan baik fisik maupun non fisik yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa selama ini dapat dijadikan sebagai modal dasar bagi tahapan pembangunan selanjutnya. Namun masih banyak yang harus diperbaiki, terutama fasilitas penyediaan air bersih, dermaga, jalan desa dan penataan tata ruang Desa.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Pulau Harapan, membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana prioritas program dan kegiatan-kegiatan mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana programprioritas

dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

a. Bidang Pendidikan

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan yang akan mendorong tumbuhnya sikap dan perilaku sehingga dapat mendorong terwujudnya perogram revolusi mental terhadap masyarakat pedesaan. Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Pulau harapan akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah desa.

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Pulau Harapan, dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 1
Penduduk Desa Pulau Harapan Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2015 s.d 2016

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Tidak Tamat Sekolah SD	85
2.	Tamat Sekolah SD	577
3.	Tamat Sekolah SLTP	446
4.	Tamat SMU	107
5.	Tamat Akademi/DI/DII/DIII	1
6.	Tamat Strata I	25
7.	Tamat Strata II	0

Sumber : Profil Desa Tahun 2015

Tabel di atas dapat dilihat bahwa permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, sehingga menyebabkan kurangnya tenaga pengajar yang berasal dari Desa Pulau Sembilan yang bisa dilihatkan dalam pengelolaan pendidikan. Masalah

pendidikan harus diatasi oleh pemerintah desa dengan melihat potensi pendidikan yang telah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan mulai dari Paud sampai dengan SMK, ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016

No	TINGKATAN SEKOLAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH SISWA
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	15	11	26 Siswa
2.	Taman Kanak-Kanak	27	30	47 Siswa
3.	Sekolah Dasar	129	128	257 Siswa
4.	SMP	58	79	147 Siswa
5.	SMU / SMK / MA	51	53	104 Siswa
6.	Diploma I, II, III	0	1	0 Mahasiswa
7.	Strata Satu dan dua (S1, S2, S3)	0	0	0 Mahasiswa

Sumber : Profil Desa Tahun 105

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih kurangnya masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan pada tingkatan diploma dan strata satu atau dua. Pada tanggal 04 april 2016 melalui rapat koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat disepakati beberapa program strategis dibidang pendidikan diantaranya :

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat secara umum dan kesadaran orang tua.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan khususnya pendidikan Usia Dini, SD,SMP, SMK dan Perguruan Tinggi.
- 3) Penyediaan sarana transportasi laut bagi siswa yang berada di Pulau Liang-liang.

Program strategis pemerintah desa Pulau Harapan yang ditawarkan kepada masyarakat ternyata belum mampu menjawab semua permasalahan dibidang pendidikan. Hal ini didukung

Mikyal Arsyad, S. Pd. MP yang mengatakan bahwa:

“Rendahnya kualitas pendidikan di Pulau Harapan dikarenakan banyaknya masyarakat yang langsung melibatkan anaknya untuk membantu pekerjaan orang tua yang mayoritas sebagai nelayan dari pada mendorong anaknya untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan masih kurangnya Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil bersedia untuk ditempatkan dipulau harapan dikarenakan akses trasfortasi yang sangat sulit serta letak geografis berada didaerah yang dikelilingi oleh laut, salah satu Contohnya SMK Negeri 4 Sinjai yang telah berdiri selama 05 tahun sampai saat sekarang ini hanya memiliki 2 PNS”. (Wawancara Tanggal 22 Mei 2016).

Dari hasil wawancara di atas dilihat bahwa permasalahan utama pendidikan adalah faktor ekonomi dan kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan yang ingin betugas atau mengabdikan dirinya di Desa Pulau Harapan. Ini dapat dilihat dari kondisi geografis Desa Pulau Harapan yang luas wilayahnya \pm 1,75 Km² yang di kelilingi air laut. Desa Pulau Harapan mempunyai jarak dengan ibu kota Kabupaten Sinjai adalah \pm 20 km dan jarak Ke ibu kota Provinsi adalah 270 km.

b. Bidang Perekonomian Desa

Perekonomian Desa Pulau Harapan ditopang oleh beberapa mata pencaharian yang teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Jumlah Penduduk Desa Pulau Harapan
Menurut Mata Pencaharian
Tahun 2015

No	Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Buruh Nelayan	175	
2	Nelayan	1858	
3	Peternak	132	
4	Pedagang	57	

5	Tukang Kayu	11	
6	Tukang batu	5	
7	Penjahit	5	
8	Pns	48	
9	Pensiunan	3	
10.	Tni/Polri	-	
11.	Perangkat desa	9	
12.	Pengrajin	5	
13.	Indutri kecil	5	
14.	Lain-lain	-	
	JUMLAH	2.263	

Sumber : Profil Desa Tahun 2015

Dari tabel diatas dilihat bahwa mayoritas pekerjaan penduduk adalah nelayan, sehingga program strategis yang dirancang oleh untuk memperbaiki perekonomian desa terfokus pada bidang perikanan diantaranya :

- 1) Merubah pola pikir masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan, dengan mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kawasan kelautan, melalui penyuluhan dengan Dinas terkait yang dilaksanakan secara aktif dan berkelanjutan.
- 2) Pemberian bantuan alat- alat yang dapat membantu masyarakat dalam kegiatan usaha perikanan.
- 3) Pembangunan dan pemeliharaan dermaga kapal nelayan.

Dari beberapa program pemerintah perekonomian, ternyata belum mampu keluhan masyarakat. Hal ini didukung dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muh. Aming, mengatakan bahwa :

“Seharusnya pemerintah desa dalam merancang program kerja strategis harus melihat kebutuhan masyarakat yang mayoritas kehidupan mereka tergantung dari hasil laut, salah satu contoh saat ini banyak bantuan-bantuan hibah dari pemerintah berupa keramba jaring apung yang diberikan kepada masyarakat tidak termamfaatkan secara maksimal ini diakibatkan kurangnya pendampingan yang dilakukan baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa,

pemerintah daerah maupun pemerintah desa, jadi saya menawarkan kepada pemerintah desa agar kiranya dapat merancang program kerja pendampingan dan penyuluhan secara maksimal pada bidang perikanan agar bantuan hibah pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga membantu pengembangan ekonomi masyarakat". (Wawancara Tanggal 22 Mei 2016).

Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan beberapa bantuan hibah pemerintah yang belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat atau aparat desa. Seperti keramba jaring apung dimana pemerintah pusat memberikan bantuan pengadaan keramba hampir setiap tahunnya tetapi tidak mampu digunakan secara optimal ini dikarenakan kurangnya pendampingan/penyuluhan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat tentang mekanisme pemanfaatan keramba jaring apung,

Hasil wawancara dengan Muh. Tang mengatakan bahwa :

"Seharusnya pemerintah desa dalam pengembangan perekonomian masyarakat dapat melihat kondisi geografis yang ada di Pulau Harapan contohnya sampai saat sekarang ini belum ada program yang dirancang oleh pemerintah Desa dalam pengembangan pariwisata padahal kalau kita lihat ada beberapa tempat di Desa Pulau Harapan yang bisa dijadikan tempat pariwisata". (Wawancara Tanggal 27 Juni 2016).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa belum mampunya pemerintah Desa merancang program pengembangan dibidang pariwisata padahal Desa Pulau Harapan mempunyai peluang untuk pengembangan bidang tersebut yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Ada beberapa masyarakat terpaksa menggunakan BOM ikan untuk menangkap ikan demi meningkatkan perekonomian keluarga. Hal inilah yang harus

menjadi pertimbangan pemerintah Desa dalam merancang sebuah program kerja peningkatan perekonomian desa.

c. Bidang Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di desa Pulau Harapan yaitu Puskesmas 1 buah, Polindes 1 buah, Posyandu 1 buah, Tenaga Dokter tidak ada, dan Tenaga Kesehatan (Bidan) 3 Orang.

Program Strategis pemerintah desa dibidang kesehatan diantaranya:

- 1) Aktif melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan..
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana Posyandu, Pos Ukk, Pos Bindu dan pemberian makanan tambahan bagi anak baliata kurang gizi.
- 3) Penyediaan Fasilitas Ambulance Desa dalam bentuk kapal.

Desa Pulau Harapan yang merupakan ibu kota Kecamatan Pulau Sembilan belum memiliki tanaga ahli dibidang kesehatan (Dokter). Dari wawancara dengan Rasmawati mengatakan bahwa:

"Pemerintah Desa yang telah mendapatkan dana desa yang begitu banyak seharusnya dapat merancang program kerja dibidang kesehatan dengan mendatangkan tenaga ahli (Dokter) kalau bisa setiap minggu agar warga masyarakat yang mengalami penyakit yang tidak dapat diobati oleh bidan itu bisa memeriksakan dirinya pada dokter yang datang dipulau kami, karena kalau kami yang mau kekecamatan sinjai utara itu menggunakan biaya yang tidak sedikit". (Wawancara Tanggal 22 Mei 2016).

Dari wawancara dengan petugas kesehatan yang ada di Desa Pulau Harapan Juwita dan Ramli mengatakan bahwa:

"Untuk meringankan masyarakat pada persoalan kesehatan harusnya pemerintah Desa mempercepat pengadaan Ambulance Desa dalam bentuk kapal untuk mempermudah masyarakat dan mempercepat pena-

diinginkan terjadi misalnya kecelakaan patah tulang yang dialami masyarakat yang sering terjadi dikarenakan perkerjaan sebagai nelayan”.

Dapat dilihat bahwa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat pada bidang kesehatan adalah bagaimana aparat desa mampu untuk mendatangkan tenaga ahli bidang kesehatan (Dokter) sehingga masyarakat tidak lagi ke Kecamatan Sinjai Utara untuk mengobati beberapa penyakit yang harus ditangani oleh Dokter Ahli. Serta pengadaan Ambulance Desa dalam bentuk kapal untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan kesehatan.

d. Bidang Keagamaan

Desa Pulau harapan mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4

Data Masjid

No	Nama Masjid	Lokasi	Ketua Takmir	Status /Luas Tanah	Berdiri Tahun	Ket
1.	Al Jazairiah	Dusun Kambuno Barat	H. Adhan	Hibah	1962	
2.	Baburahman	Dusun Kambuno Timur	Saefuddi	Hibah	1982	
3.	Al-Badiyat	Dusun Pulau Liang-liang	Andi Aziz	Hibah	1963	

Sumber : Profil Desa Tahun 2015

Tabel 5

Data TPQ di Desa Pulau Harapan

No	Nama TPQ	Lokasi	Pengajar	Status Tanah	Berdiri Tahun	Ket
1	Tk/TPA AL-Jazairiah	Dusun Kambuno Barat	3 Orang	Hibah	2001	48 santri

Sumber : Profil Desa Tahun 2015

Tabel 6
 Data Kelompok pengajian

No	Nama Klp Pengajian	Jumlah siswa	Alamat	Ket
1.	Mihaya	12 Siswa	Dusun kambuno selatan	
2.	Harlina	22 Siswa	Dusun kambuno selatan	
3.	suriati	28 Siswa	Dusun Kambuno selatan	
4.	Ummiati	24 Siswa	Dusun kambuno selatan	
5.	Marwati	16 Siswa	Dusun kambuno selatan	
6.	St. Londe	3 Siswa	Dusun kambuno selatan	
7.	Suryani	14 Siswa	Dusun kambuno Timur	
8.	Haeria	22 Siswa	Dusun kambuno Timur	
9.	Sukaena	15 Siswa	Dusun kambuno Timur	
10.	Sairah	24 Siswa	Dusun kambuno Timur	
11.	Zakaria	16 Siswa	Dusun kambuno Timur	
12.	Patiman	13 Siswa	Dusun P.Liang-Liang	
13.	Suhti	14 Siswa	Dusun P.Liang-Liang	
14.	Dg. masyinnong	12 Siswa	Dusun P.Liang-Liang	
15.	Rela	20 Siswa	Dusun P.Liang-Liang	

Sumber : Profil Desa Tahun 2015.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengembangan ilmu keagamaan dibidang baca tulis Al-Qur'an didesa pulau harapan berjalan sangat didukung oleh masyarakat ini dapat bahwa masih banyaknya tempat pengajian yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat selain tempat pengajian yang dikelola secara kelompok/TK-TPA.

Program Pemerintah Desa dibidang keagamaan diantaranya:

- 1) Peningkatan pengetahuan agama dengan pembentukan majelis Taklim dan pengaktifan Remaja Mesjid.
- 2) Kegiatan-kegiatan keagamaan dan dialog interaktif dengan seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Bantuan fasilitas untuk keperluan tempat ibadah atau pelaksanaan ibadah.
- 4) Peningkatan dan pemeliharaan etika dan adat istiadat yang ada dan tumbuh di masyarakat.

Belum adanya program pemerintah desa terfokus pada peningkatan fasilitas tempat baca tulis-Al-Qur'an dan peningkatan kesejahteraan guru mengaji. Salah satu guru mengaji Mihaya dan diperkuat dengan informan lainnya H. Adhan dan St. Londe tentang tanggapan terhadap program strategis di bidang keagamaan mengatakan bahwa :

“Jika pemerintah desa pulau harapan menginginkan seluruh masyarakat yang ada didesa ini semua pandai mengaji, maka diharapkan dalam merancang program strategis dibidang keagamaan agar kiranya dapat melengkapi fasilitas-fasilitas Baca Tulis Al-Qur'an pada tempat yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri maupun yang dikelola oleh supaya tidak membebankan lagi kepada masyarakat misalnya harus membeli Al-Qur'an untuk anaknya”. (Wawancara Tanggal 09 Mei 2016).

Dapat dilihat bahwa masyarakat menginginkan kepada pemerintah Desa Pulau Harapan selain memperhatikan fasilitas Baca Tulis Al-Qur'an yang dikelola oleh kelompok juga dapat memperhatikan dan mengadakan fasilitas Baca Tulis Al-Qur'an yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

e. Sarana dan Prasarana

Pada sebagian infrastruktur, pihak Desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW.

Tabel 7

Jumlah Prasarana Dan Sarana Desa Tahun 2015

No	Jenis prasarana & sarana desa	Tahun 2015	Volume
1.	Jalan Rabat Beton	4	3,90 km
2.	Jalan Stepak/Kecil	0	0
3.	Dermaga Pantai/Tambatan perahu	5	150 m
4.	Gedung Pendidikan	7	7 gedung
5.	Gedung Serbaguna	1	0
6.	Gedung Posyandu	0	0

7.	Lapangan Sepakbola	1	1
8.	Bak Penampungan Air	0	0

Sumber : Profil Desa Tahun 2015

Untuk peningkatan perekonomian masyarakat maka diperlukan pengembangan sumber daya manusia dan pemamfaatan sumber daya alam serta pengembangan infrastruktur Desa, ini didukung dengan hasil wawancara kami dengan Sukarman dan wakil ketua BPD Rasmawati Muin, S. Pd mengatakan bahwa :

“kami selaku perwakilan BPD Desa Pulau Harapan dalam rapat koordinasi program kerja desa pada tanggal 05 April 2016 menawarkan beberapa program kerja desa dalam menunjang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemamfaatan Sumber Daya Alam (SDA) itu semua tergantung dari Infrastruktur yang ada maka saya menawarkan diantaranya :

- 1) Pembangunan bak penampungan air
 - 2) Perbaikan Dermaga
 - 3) Gedung Posyandu,
 - 4) Pembangunan jalan
 - 5) Pembangunan drainase.
 - 6) Perbaikan gedung pendidikan utamanya gedung TK.
 - 7) Kelanjutan pembangunan gedung serbaguna.
 - 8) Pembangunan jembatang penghubung Pulau Kambuno dengan Pulau Liang-Liang
 - 9) Penghijauan lapangan.
- dan tak lupa bagaimana pemerintah desa bisa memamfaatkan hibah-hibah pemerintah yang diberikan pada masyarakat dengan melakukan proses pendampingan”. (Hasil Wawancara tanggal 09 Mei 2016).

Untuk melihat program strategis pemerintah desa tentang pengembangan infrastruktur Desa diantaranya:

- 1) Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan keamanan.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana jalan desa, kebersihan, transportasi, perumahan, penyediaan air bersih, drainase, seni dan olah raga.

Ada beberapa program kerja yang dianggap penting oleh peneliti belum mampu diimplementasikan oleh Pemerintah Desa salah satu contohnya adalah tempat pembungan akhir sampah (TPAS) seperti yang dikatakan oleh Rusdi bahwa :

“Salah satu program yang harus dirancang oleh pemerintah desa pulau harapan adalah bagaimana mampu menyiapkan tempat pembuangan akhir sampah dengan membuat sebuah tanggul besar untuk dijadikan tempat pembuangan sampah jadi masyarakat tidak membuang sampah langsung kelaut yang dapat menyebabkan pencemaran air laut”. (Wawancara tanggal 27 juni 2016).

Dalam pengembangan infrastruktur Desa harus ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik itu dari internal Desa misalnya BPD maupun Eksternal Pemerintahan desa misalnya Inspektorat, BPK dan KPK sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu tokoh pemuda yang saat ini telah menjadi Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sinjai Muzawwir, S. Pd. I., M. Pd mengatakan bahwa :

“Dengan banyaknya dana yang diberikan kepada desa sudah semestinya pemerintah desa membangun Infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam pengimplementasian program infrastruktur desa harus ada pengawasan yang dilakukan baik itu dari pihak Internal pemerintahan Desa misalnya BPD maupun pihak Eksternal misalnya Inspektorat, BPK dan KPK agar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa sesuai dengan yang direncanakan. (Hasil wawancara tanggal 27 Juni 2016).

f. Bidang Pemerintahan Umum

Secara singkat sejarah Desa Pulau Harapan, sekitar tahun 1980-an sampai tahun 2001 Pulau Sembilan sebelumnya adalah sebuah kelurahan dikecamatan Sinjai Utara dibawah kepemimpinan (Lurah) H.Abd Gaffar dan setelah itu dilakukanlah pemekaran wilayah dimana Pulau Sembilan

menjadi Kecamatan tersendiri dan Desa Pulau Harapan salah satu desa didalamnya. Sekitar tahun 2001-2012 Pasca dilakukannya Pemekaran, maka Desa Pulau Harapan yang telah mendapat legitimasi sebagai desa di kecamatan Pulau Sembilan. Sebagai kepala Desa pertama adalah Muh.Tamar dan digantikan oleh Tanhar SH yang merupakan Pelaksana tugas kepala desa sekaligus menjabat sebagai Camat Pulau Sembilan. Pada tahun 2013, diambil alih oleh Abdul Latif, S. Sos. Pada tahun 2014 dilaksanakan pemilihan langsung kepala desa, maka terpilihlah H. Ambo Sakka sebagai kepala desa ke 2 untuk masa jabatan 2014-2020.

Pembagian wilayah di Desa Pulau Harapan terdiri atas 2 Pulau Kecil yaitu Pulau Kambuno dan Pulau Liang-liang dan terbagi dalam 4 dusun antara lain Dusun Kambuno Barat, Dusun Kambuno Timur, Dusun Kambuno Selatan dan Dusun Pulau Liang-Liang.

Tabel 8

Nama Pejabat Wilayah Administrasi Pemerintah

Desa Pulau Harapan Tahun 2015

No	Nama	Jabatan
1	H. Ambo Sakka	Kepala Desa
2	Anwar, S.Sos	Sekretaris Desa
3	Takbir	Bendahara
4	Irawati	Kepala Urusan Umum
5	Karmila.HM	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Arham Ubais	Pembangunan
7	Sirajuddin, Shi	Kepala Seksi Kesejahteraan
8	M. Syukri	Kepala Dusun Kambuno Barat
9	Muh. Syahrir	Kepala Dusun Timur
10	Irfan Tamar	Kepala Dusun Kambuno Selatan
11	Muh. Tahir	Kepala Dusun Pulau Liang-Liang

Sumber : Profil Desa Tahun 2015

Beberapa Organisasi atau Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Pulau Harapan diantaranya:

1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen" desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wiliyah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tabel 9
Nama Anggota Badan Permusyawaratan
Desa Pulau Harapan

No	Nama	Jabatan
1	SUKARMAN	Ketua
2	RASMAWATI MUIN	Wakil Ketua
3	NURHAYATI	Sekretaris
4	ST. JULMIA	Anggota
5	RUSDI	Anggota
6	MUH. LUTFI	Anggota
7	HASBI	Anggota
8	MUHDASING	Anggota
9	ABD. RAHMAN	Anggota
10.	MUH. BAKRI	Anggota
11.	RISNAWATI	Anggota

Sumber : Profil Desa Tahun 2015

2) Lembaga Kemasyarakatan Desa

a) Pembentukan

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dapat dibentuk atas prakarsa yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes) dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

b) Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah:

- (1) Tercapai dan terpeliharanya nilai-nilai kehidupan masyarakat desa yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan.
- (2) Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa yang berdayaguna dan berhasilguna.
- (3) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasardukungan seluruh potensi swadaya masyarakat.
- (4) Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

c) Tugas Dan Fungsi

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

(1) Tugas LKD meliputi:

- (a) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengoptimalkan potensi yang ada.

- (b) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
 - (c) Menggerakkan, memotivasi dan mengembangkan partisipasi, gotongroyong, dan swadaya masyarakat.
 - (d) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang ;
- (2) Fungsi Lembaga Kemasyarakatan:
- (a) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 - (b) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (c) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
 - (d) Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
 - (e) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotongroyong masyarakat.
 - (f) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
 - (g) Pemberdayaan hak politik masyarakat.
 - (h) Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
 - (i) Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat
- (3) Pembinaan Kesajahteraan Keluarga (PKK)
 - (a) Tujuan, gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
 - (b) Program Pokok PKK adalah 1) penghayatan dan pengamalan Pacasila; 2) gotongroyong; 3) pangan; 4) sandang; 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga; 6) pendidikan dan ketrampilan; 7) kesehatan; 8) pengembangan kehidupan berkoperasi; 9) kelestarian lingkungan hidup; 10) perencanaan sehat, Pokja I: Keagamaan, Pokja II: Pendidikan dan ketrampilan Pokja III: Sandang, Pangan Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga Pokja IV : Kesehatan.
 - (4) Perlindungan Masyarakat/LINMAS, masih ada Lembaga-lembaga lain Secara keseluruhan lembaga-lembaga desa terdiri dari:
 - a. LKMD
 - b. PKK
 - c. LINMAS
 - d. KARANG TARUNA
 - e. KELOMPOK TANI NELAYAN
 - f. BUMDES
- Dari data diatas Pemerintah Desa Pulau Harapan memfokuskan pada program strategis diantaranya:
1. Program Peningkatan Kualitas SDA aparat Desa.

2. Program Pelatihan tugas dan tanggungjawab Perangkat Desa.
3. Program Pembinaan perangkat Desa.
4. Perogram Peningkatan partisipasi lembaga Lembaga desa dalam kegiatan pembangunan Desa.

7) PEMBAHASAN PENELITIAN

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan menjadi hal yang sebaiknya kita ketahui untuk menambah wawasan kita terhadap hal yang selalu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, karena kita selalu melewati proses pendidikan. Oleh sebab itulah kita sebagai pelaku harus paham juga apa pengertian pendidikan itu sendiri. *Pendidikan* bukan hanya untuk di ketahui melainkan dengan memahaminya lalu berusaha untuk menjalankan perosesnya berdasarkan apa yang memang tertuang dalam pendidikan tersebut. Kita terlalu sering melihat berbagai kejadian nyata yang mencoreng nama baik dari pendidikan mungkin salah satu penyebabnya adalah dikarenakan mereka tidak menguasai nilai-nilai apa yang di artikan dalam kata pendidikan itu sendiri.

Keputusan dalam bidang pendidikan yang telah diprogramkan oleh pemerintah Desa Pulau Harapan tentu membutuhkan kegiatan sosialisasi dimasyarakat, agar masyarakat memahami dan sejalan dengan keinginan mereka. Dalam hal ini sosialisasi tentang pendidikan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa.

Sebagaimana dikatakan oleh Atmosoeprapto (Kisdarto. 2000:2012) Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan yang fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia dalam bentuk sosialisasi.

Sebagai bagian dari proses pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan harus mendapat perhatian penting. Desa yang tidak memiliki sarana pendidikan pasti mengalami kendala pada proses pencapaian hasil pendidikan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Desa Pulau Sembilan yang telah memiliki fasilitas pendidikan mulai dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bagian terpenting yang ada di Desa.

2. Bidang Perekonomian Desa

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin.

Eksistensi pemerintah dalam dalam membangun ekonomi pedesaan melalui strategi program kerja melihat dari Permasalahan Desa yang selama ini secara umum sebetulnya hanya satu, bahwa desa jauh tertinggal di bandingkan dengan kota.

Bilamana melihat akar permasalahannya sederhana dikarenakan pemerintah selama ini mengacu kepada pembangunan yang bersifat sentralistik. Dengan semangat UU Desa yang telah disahkan pembangunan di pedesaan tentunya dengan semangat baru disertai pembangunan tidak sentralistik lagi melainkan desentralisasi, sehingga diharapkan proses pembangunan di pedesaan akan terjadi percepatan perekonomian desa.

Sebagaimana dikatakan oleh Haeruman (1997:37) bawa ada dua sisi pandang dalam pengembangan perekonomian desa yaitu:

- a. Pengembangan perekonomia desa dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang
- b. Sisi yang lain memandang bahwa pengembangan perekonomian desa sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan. Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Sasaran pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah: pertama, peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan; kedua, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa; ketiga, penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa; keempat, pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa; kelima, pengembangan sarana dan prasarana pedesaan; dan

keenam, pemantapan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

3. Bidang Kesehatan

Pembinaan ini ditujukan untuk pembentukan masyarakat yang sehat, baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa. Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan daerah otonomi melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pemerintah Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dengan cara mengumpulkan masyarakat untuk memberikan pengertian tentang apa-apa yang perlu dilaksanakan suatu kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan. Apabila masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut maka pemerintah desa tinggal mengarahkan dan memberikan bimbingan bagaimana system pengelolaan suatu program di Bidang Kesehatan. Begitupun perhatian pemerintah desa di bidang kesehatan terbukti di setiap dusun yang ada di desa ini di adakan posyandu yang mana di tempat ini disetiap bulan di adakan penimbangan balita dan penyuluhan kepada ibu baik ibu-ibu menyusui, nifas, dan juga tempat pemberian makanan tambahan bagi anak-anak usia dini dan pemberian vitamin, imunisasi baik imunisasi campak, bcg, dpt, oleh tenaga kesehatan yang bekerjasama dengan kader posyandu yang dipandu oleh tim penggerak PKK Desa.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Siagian (Siagian 1996: 27-28) bahwa Berkaitan dengan

badan kesehatan tersebut sering dijuluki sebagai kesehatan jasmani yaitu jika koordinasi organ-organ tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya dalam keadaan yang stabil atau normal. Sementara kesehatan rohani merupakan kesehatan jiwa manusia atau makhluk hidup yang memiliki akal dan pikiran, apabila seorang tersebut memiliki koordinasi pikiran dan hati yang tenang sekaligus nyaman pada saat itu.

Yang tak kalah pentingnya dalam melihat keberhasilan bidang kesehatan adalah bagimana program yang dilakukan oleh pemerintah desa mampu menyadarkan masyarakat untuk melakukan pengobatan pada sarana kesehatan yang telah disiapkan.

4. Bidang Keagamaan

Mayoritas masyarakat Desa Pulau Harapan adalah beragama Islam. Pendidikan keagamaan itu sendiri merupakan suatu upaya atau proses yg dilakukan secara sadar dan terencana membantu masyarakat melalui pembinaan bimbingan dan pengembangan potensi mereka secara optimal agar nanti dapat memahami menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sebagai keyakinan dan pandangan hidup demi keselamatan di dunia dan akherat serat merupakan usaha yang sistimatis pragmatis dan metodologis dalam membimbing anak didik atau tiap individu dalam memahami menghayati dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh demi terbentuk kepribadian yang utama menurut ukuran Islam. Dan pendidikan keagamaan juga merupakan segala upaya pembinaan dan pengembangan potensi anak didik untuk diarahkan mengikuti jalan yang Islami demi memperoleh keutamaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat.

Pendidikan Agama Islam dikembangkan dengan menempatkan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa sebagai spirit dalam proses pengelolaan dan pembelajaran. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan mengintegrasikan wawasan keagamaan pada progam kerja pemeritah desa dengan menyediakan dukungan bahan dan sarana pembelajaran seperti kitab suci, buku referensi keagamaan dan tempat ibadah. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan keagamaan terkadang masih belum sepenuhnya menjadi alat perubahan nilai budaya masyarakat, tetapi masih lebih mengutamakan mengajarkan nilai-nilai budaya lama. Peserta didik kurang dibekali dengan realitas yang berkaitan dengan hakekat hidup dan kehidupan sehari-hari yang dialami di lingkungan tempat tinggalnya. Pendidikan agama Islam bukan hanya bisa didapat pada jenjang persekolahan tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dengan dibangunnya berbagai macam tempat pendidikan keagamaan salah satu contohnya adalah tempat Baca Tulis Al-Qur'an baik yang dikelola secara mandiri maupun secara kelompok. Perubahan ini sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum yaitu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

5. Bidang Infrastruktur/Sarana Prasarana

Meskipun sasaran pembangunan perdesaan merupakan kegiatan yang multidimensi dan multi sektoral, pembangunan infrastruktur perdesaan dituntut untuk dapat memperhatikan aspek-aspek penting pembangunan perdesaan. Dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan pembangunan perdesaan, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menopang

kegiatan yang diinginkan. Termasuk diantaranya adalah sektor-sektor ekonomi yang akan dikembangkan dalam suatu kawasan. Program pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan salah satu program pembangunan infrastruktur untuk kawasan desa dalam kategori berkembang yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Adapun makna dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat pemerintah desa. Seperti yang dijelaskan di atas, pemerintah Indonesia saat ini telah menerapkan strategi konvensional dalam rangka membangun desa yang sejahtera dan merata, melalui banyak program yang dilakukan. Dengan kata lain yang telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui beberapa program berorientasi untuk pembangunan, berorientasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan berorientasi untuk menghapuskan kemiskinan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (Tjokroamidjojo 37-38) Kawasan Perdesaan memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan nasional. Kemandirian pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan kawasan perdesaan dalam mendorong perkembangan ekonomi di kawasan desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa tersebut. Perkembangan Infrastruktur akan mendukung pengembangan ekonomi kawasan perdesaan yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kawasan pedesaan terhadap kota, dan menguatkan peran desa sebagai pusat produksi dan kebutuhan sumberdaya pembangunan. Membangun hubungan keterkaitan antar desa-kota juga merupakan salah

satu cara yang ditempuh sebagai suatu upaya pembangunan wilayah perdesaan, dimana peran desa dikuatkan sebagai pusat produksi dan sumberdaya. Keterkaitan tersebut dapat mengurangi ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan perkotaan, dan mengurangi angka urban masyarakat dari desa ke kota.

6. Bidang Pemerintahan Umum

Secara umum di Indonesia, desa dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Wilayah yang ada pemerintahannya Desa langsung berada di bawah Camat. Dalam sistem administrasi negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan menjadi instrumen koordinator dari penguasa supra desa (Negara melalui Pemerintah dan pemerintah daerah).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka

saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Masyarakat dan pemerintah di desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan menginginkan pemerintah merupakan pemegang kendali utama pada proses pelaksanaan pembangunan atau menjadi perancang dan pengimplementasian program kerja desa. Langka untuk meningkatkan suatu pembangunan itu adalah partisipasi dari masyarakat. Pembangunan tanpa adanya partisipasi akan terbengkalai oleh kerena itu langka atau strategi yang di buat pemerintah Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan untuk merealisasikan program kerja ialah:

1. Melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan mendengarkan ide-ide atau pokok-pokok pikiran yang di kemukakan masyarakat.
2. Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Strategi ini masyarakat akan ikut berpatisipasi di karnakan bahwa masyarakat merasa ada hubungan antara pemerintah.
3. Menjadi pelaku utama atau memberikan contoh yang baik juga merupakan langkah yang harus dilakukan pemerintah desa pulau harapan.

2. Saran

Dari kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran agar proses perencanaan program kerja strategi untuk meningkatkan partisipasi dan menekan banyaknya kritikan dari masyarakat yaitu :

1. Pemerintah Desa Pulau Harapan lebih memantapkan diri sebagai pemegang kendali dalam

implementasi program kerja pembangunan sehingga pekercayaan masyarakat tetap ada.

2. Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah atau cara-cara lain untuk mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. Memberikan ruang yang besar untuk masyarakat dalam memberikan pendapat ataupun kritikan kepada pemerintah.
3. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan bersamaan dalam proses pembangunan di Desa sehingga memungkinkan pembangunan berjalan lancar dan masyarakat lebih meningkatkan partisipasi.
4. Pemerintah dan masyarakat harus meningkatkan hubungan atau kordinasi dengan baik sehingga akan memunculkan banyak keberhasilan dalam pembangunan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Atmosoeprapto, Kisdato. 2000. *Menuju SDM Berdaya*. Edisi pertama Jakarta. Gramedia.
- Arikonto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta PT.
- Asriadi AR, 2013, *Strategi Entrepreneurial Government (Pemerintahan Bergaya Wirausaha) Pokok Pikiran Dalam Membangun Kemandirian Desa*, Sinjai
- Bryson John M, 2001, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Terjemahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 1996, *Reinventing Government: Pokok-Pokok Pikiran dan Relevansinya di Indonesia*, Makalah Pada Pelatihan Manajemen Strategik bagi Direktur RSUD oleh Magister Manajemen Rumah Sakit, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 1997, *Pemerintah yang Efisien, Tanggap, dan Akuntabel: Kontrol atau Etika*, dalam JKAP, Vol.1 No.2, Yogyakarta.
- Dowlond, <http://Presepsi masyarakat>. Tanggal 7 Mei 2016.
- Glezer, Barney G. Anselm L. Strauss, 1976, *The Discovery of Grounded Theory, Strategy for*

- Qualitative Research, Chicago, Aldine Publishing Company.
- Goodman, Jon, 1993, *Kewirausahaan Dalam Perusahaan, Manajemen*, No.89.
- Hughes, Edgar, Owen, 1994, *Public Management And Administration*, St. Martin's, United States of America.
- John W Creswell, 2013, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta.
- Keban, Yeremias T., 2000, *Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*, dalam *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta.
- Lupiyoadi, Rambat dan Hasan, Bakir, 1999, *Desain Struktur Yang Mendukung Kewirausahaan Organisasi*, Man dan Usaha Ind 07.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Moleong, J, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution.S, 1988, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Noeng Muhamdijir, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologistik Realisme Methaphisik*, PT.Rake Saras, Yokyakarta.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted, 1995, *Mewirausahaan Birokrasi: mentranformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik jilid 2* (terjemahan), PPM, Jakarta.
- Osborne, David dan Plastrik, Peter, 2000, *Memangkas Birokrasi : lima strategi menuju pemerintahan wirausaha* (terjemahan), PPM, Jakarta,.
- Siagian P, Sondang, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Siagian, P, Sondang, *Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Siregar, Edi, 1982, *The Dictionary of Political Analysis*, Terjemahan, CV.Rajawali, Jakarta
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi (Memahami Penelitian Kualitatif)*. Bandung; Alfabeta.
- Takhlisus Khotib (2011) *Strategi Dalam Menumbuhkan Semangat Jiwa Kewirausahaan Masyarakat (Study Kasus di Desa Grabag Kabupaten Magellang)*, Magellang.
- Thoha, Miftah, 1997, *Restrukturisasi dan Revitalisasi Administrasi Negara Dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Orasi Ilmiah pada Program Pasca UNPAD, Bandung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembanginan)*, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Vredenbregt, Jacob, 1980, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.